

**FORMAT PENYUSUNAN LKPJ  
TAHUN ANGGARAN 2019**

**A. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Urusan : Wajib Non Pelayanan Dasar  
OPD Pelaksana : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

NO	Program/Kegiatan	Belanja (Rp)		
		Anggaran	Realisasi	%
<b>1.</b>	<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>	<b>481,665,550</b>	<b>466,777,470</b>	<b>96.91%</b>
02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	79,800,000	69,571,103	87.18%
07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	145,800,000	144,200,000	98.90%
08	Penyediaan jasa kebersihan kantor	18,426,200	18,387,900	99.79%
09	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	10,375,000	10,374,500	100.00%
10	Penyediaan alat tulis kantor	58,565,600	58,565,600	100.00%
11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	14,249,400	14,232,000	99.88%
12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	9,846,850	9,846,000	99.99%
15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	8,900,000	8,820,000	99.10%
17	Penyediaan makanan dan minuman	19,800,000	19,464,450	98.31%
18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	44,950,000	42,444,700	94.43%
19	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	70,952,500	70,871,217	99.89%
<b>2.</b>	<b>Program Peningkatan sarana dan prasarana aparatur</b>	<b>526,335,444</b>	<b>517,619,744</b>	<b>98.34%</b>
09	Pengadaan perlengkapan gedung kantor	464,116,444	459,026,444	98.90%
22	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	10,247,000	10,000,000	97.59%
24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	51,972,000	48,593,300	93.50%
<b>3</b>	<b>Program Penataan Administrasi Kependudukan</b>	<b>4,024,705,756</b>	<b>3,986,653,396</b>	<b>99.05%</b>
01	Pembangunan dan Pengoperasian SLAK Secara Terpadu	79,100,000	77,200,000	97.60%
03	Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan)	44,300,000	44,000,000	99.32%
07	Penyediaan informasi yang dapat diakses masyarakat	68,297,500	62,871,971	92.06%
14	Monitoring dan evaluasi penyusunan rencana pembangunan kependudukan	25,000,000	24,895,200	99.58%
15	Pelayanan Kartu Identitas Anak	46,650,000	46,237,000	99.11%
17	Penerbitan NIK nasional dan penerapan e-KTP	86,400,000	86,324,900	99.91%
22	Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK)	73,600,000	73,552,700	99.94%
25	Pendataan dan Pelaporan Perkawinan CeraI	42,602,500	42,495,400	99.75%
27	Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse	57,275,000	56,374,600	98.43%
28	Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital	34,462,300	34,458,600	99.99%
31	Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu (DAK Non Fisik)	1,488,701,000	1,487,277,904	99.90%
34	Pelayanan Administrasi Kependudukan disatker	1,752,418,500	1,725,617,471	98.47%
36	Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga	70,850,900	70,759,600	99.87%
38	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil	29,044,600	28,719,500	98.88%
39	Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk	25,890,000	25,862,800	99.89%
41	Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran	64,826,456	64,769,350	99.91%
42	Peningkatan Pencatatan Kematian	35,287,000	35,236,400	99.86%

4	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	57,095,000	57,042,900	99.91%
	21 Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja	57,095,000	57,042,900	99.91%
	<b>JUMLAH</b>	<b>5,089,801,750</b>	<b>5,028,093,510</b>	<b>98.79%</b>

## B. REALISASI PELAKSANAAN RPOGRAM DAN KEGIATAN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran mempunyai anggaran belanja sebesar Rp. 481.665.550,00 dan terelisasi sebesar Rp. 466.777.470 atau sebesar 96.91 % yang terdiri dari :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sebesar Rp. 79.800.000,00 dan terealisasi sebesar Rp. 69.571.103,00 atau sebesar 87 % disebabkan karena Belanja tersebut berdasarkan tagihan perbulannya.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi keuangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 145.800.000,00 terealisasi sebesar Rp. 144.200.000,00 atau sebesar 99 % disebabkan karena ada honor Kuasa Penggunaan yang tidak bisa dibayarkan.
- Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 18.426.200 terelialisasi sebesar Rp. 18.387.900 atau sebesar 99,99 %
- Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.375.000 terelialisasi sebesar Rp. 10.374.500 atau sebesar 99,99 %
- Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor terelialisasi sebesar 100 %
- Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan mempunyai anggaran sebesar Rp. 14.249.400 terelialisasi sebesar Rp. 14.232.000 atau sebesar 99,99 %
- Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/penerangan bangunan mempunyai anggaran sebesar Rp. 9.846.850 terelialisasi sebesar Rp. 9.846.000 atau sebesar 99,99 %
- Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan mempunyai anggaran sebesar Rp. 8.900.000 terelialisasi sebesar Rp. 8.820.000 atau sebesar 99,99 %
- Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum Rapat mempunyai anggaran sebesar Rp. 19.800.000 sebesar Rp. 19.464.450 atau sebesar 98 %
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 44.950.000 terelialisasi sebesar Rp. 42.444.700 atau sebesar 94 % disebabkan adanya kelebihan BBM kendaraan yang tidak dapat dibelanjakan sementara belanja SPPD sudah habis
- Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah mempunyai anggaran sebesar Rp. 70.952.500 terelialisasi sebesar Rp. 70.871.217 atau sebesar 99,99 %

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Apratur mempunyai anggaran sebesar Rp. 526.335.444 terelialisasi sebesar Rp. 517.619.744 atau sebesar 98 %

- Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 464.116.444 terelialisasi sebesar Rp. 459.026.444 atau sebesar 99,99 % disebabkan adanya selisih harga kontrak
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor mempunyai anggaran sebesar Rp. 10.247.000 terelialisasi sebesar Rp. 10.000.000 atau sebesar 98 % di sebabkan adanya belanja cetak yang tidak dibelanjakan.
- Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkaa kendaraan dinas/operasional mempunyai anggaran sebesar Rp. 51.972.000 terelialisasi sebesar Rp. 48.593.300 atau sebesar 93 % karena adanya sisa belanja pajak kendaraan

3. Program Penataan Administrasi Kependudukan mempunyai anggaran sebesar Rp. 4.024.705.756 terelialisasi sebesar Rp. 3.986.653.396 atau sebesar 99 %

- Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK secara terpadu mempunyai anggaran sebesar Rp. 79.100.000 terelialisasi sebesar Rp. 77.200.000 disebabkan adanya kelebihan belanja Kuasa Pengguna Anggaran dan belanja BBM yang tidak bisa dibelanjakan
- Kegiatan Implementasi sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) mempunyai anggaran sebesar Rp. 44.300.000 terelialisasi sebesar Rp. 44.000.000 atau sebesar 99 % disebabkan adanya kelebihan belanja perjalanan dinas
- Kegiatan Penyediaan Informasi yang dapat diakses masyarakat mempunyai anggaran sebesar Rp. 68.297.500 terelialisasi sebesar Rp. 62.871.971 atau sebesar 92 % disebabkan karena adanya belanja bahan material even yang tidak jadi dilakukan

- Kegiatan Monitoring dan evaluasi Penyusunan rencana pembangunan kependudukan mempunyai anggaran sebesar Rp. 25.000.000 terelialisasi sebesar Rp. 24.895.200 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak mempunyai anak mempunyai anggaran sebesar Rp. 46.650.000 terelialisasi sebesar Rp. 46.237.000 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e-KTP mempunyai anggaran sebesar Rp. 86.400.000 terelialisasi sebesar Rp. 86.324.900 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil Keliling (UP3SK) mempunyai anggaran sebesar Rp. 73.600.000 terelialisasi sebesar Rp. 73.552.700 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Pendataan dan Pelaporan Perkawinan CeraI mempunyai anggaran sebesar Rp. 42.602.500 terelialisasi sebesar Rp. 42.495.400 atau sebesar 99,99 %
  - Anggaran kegiatan Pengelolaan Arsip Administrasi Kependudukan Berbasis Digital sebesar Rp. 34.462.300 terelialisasi sebesar Rp. 34.458.600 atau sebesar 99,99 %
  - Anggaran Kegiatan Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) terpadu (DAK Non Fisik) sebesar Rp. 1.488.701.000 terelialisasi sebesar Rp. 1.487.277.904 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan Disatker mempunyai anggaran sebesar Rp. 1.752.418.500 terelialisasi sebesar Rp. 1.725.617.471 atau sebesar 98 % disebabkan adanya belanja modal yang tidak dapat dibelanjakan
  - Kegiatan Pelayanan Penerbitan Kartu Keluarga mempunyai sebesar Rp. 70.850.900 terelialisasi sebesar Rp. 70.759.600 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pencatatan Sipil mempunyai anggaran sebesar Rp. 29.044.600 terelialisasi sebesar Rp. 28.719.500 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pendaftaran Penduduk sebesar Rp. 25.890.000 terelialisasi sebesar Rp. 25.862.800 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Kelahiran mempunyai anggaran sebesar Rp. 64.826.456 terelialisasi sebesar Rp. 64.769.350 atau sebesar 99,99 %
  - Kegiatan Peningkatan Pencatatan Kematian mempunyai anggaran sebesar Rp. 35.287.000 terelialisasi sebesar Rp. 35.236.400 atau sebesar 99,99 %
4. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai satu Kegiatan yaitu kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pelaporan Capaian Kinerja dengan anggaran sebesar Rp. 57.095.000 terelialisasi sebesar Rp. 57.042.900 atau sebesar 99,91 % disebabkan adanya kelebihan belanja perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi dan belanja BBM Kendaraan**

### C. PERMASALAHAN DAN SOLUSI

#### 1. Pelaksanaan Kegiatan Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)

- Kegiatan ini mengalami kendala dikarenakan belum tersedianya sarana dan prasarana yang memadai seperti printer, scanner dan ribbon untuk pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak, sehingga saat ini pelayanan penerbitan Kartu Identitas Anak harus dilakukan secara bergantian dengan penerbitan KTP\_el.

#### 2. Pelaksanaan Pelayanan Unit Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Keliling (UP3SK)

- Kegiatan ini mengalami masalah terkait tidak tersedianya jaringan internet di beberapa titik layanan yang menyebabkan pelayanan tidak maksimal sehingga titik layanan harus digeser ke lokasi yang tersedia jaringan internetnya.

#### 3. Penerbitan NIK Nasional dan Penerapan e\_KTP

- Kegiatan ini mengalami permasalahan untuk mencapai target kinerjanya yakni ketidakterediaan blanko KTP\_el dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 Pengadaan Blangko KTP\_el hanya bisa dilakukan oleh oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga Kab/Kota tidak mempunyai wewenang

#### 4. Kegiatan Pembangunan dan Pengelolaan Sistem Data Warehouse

- Permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :
- Sering terjadi perubahan regulasi yang mengatur tentang pengelolaan Data Warehouse dan akses data

- Aplikasi sebagai media pemanfaatan data pada Organisasi Perangkat Daerah/Lembaga Pengguna belum tersedia sehingga pemanfaatan data warehouse secara online tidak dapat dilaksanakan sehingga akses data kependudukan melalui data warehouse masih dilaksanakan secara manual.

#### **5. Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan**

- Kegiatan ini mengalami kendala pada pemilihan metode pelaksanaan pengukuran atau survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) belum menguasai metode pengukuran IKM secara menyeluruh.

#### **6. Kegiatan Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan**

- Kendala yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :  
Lambatnya atau kurangnya update Data Konsolidasi Bersih (DKB) persemester dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sehingga data yang digunakan masih data lama.

#### **7. Kegiatan Pembangunan dan Pengoperasian SIAK Secara Terpadu**

- Minimnya kapasitas dan kemampuan SDM pengolahan data dan penyajian data kependudukan.
- Permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :
- Sarana dan Prasarana pendukung masih minim untuk pemeliharaan peralatan pelayanan

#### **8. Kegiatan Pelayanan Administrasi Kependudukan di Satker**

- Beberapa kendala dan permasalahan yang dialami dalam pelaksanaan kegiatan ini adalah :
- Sering terjadinya gangguan jaringan di beberapa Unit Kerja Layanan (UKL), sehingga menghambat pelayanan dan pencapaian target Cokdit Data Penduduk.
- Masih minimnya pengetahuan dan keterampilan teknis operator dan register di Unit Kerja Layanan tentang penggunaan Aplikasi SIAK.



Palnan, Januari 2020

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil  
Kabupaten Pesisir Selatan

**EVAFAUZA YULIASMAN, SE, M.SI**  
NIP.19670712 199202 1 001